Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan
Volume. 5 Nomor. 1 Maret 2025
e-ISSN : 2809-9893; p-ISSN : 2809-9427, Hal. 223-232
DOI: https://doi.org/10.55606/jimek.v5i1.5983
Available online at: https://researchhub.id/index.php/jimek

Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

Kurniati [1*], Subhan Purwadinata [2]
[1-2] Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram, Indonesia

Alamat: Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Korespondensi penulis: kurniatiumar333@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effect of fiscal capacity and government expenditure on economic growth in West Nusa Tenggara Province from 2019 to 2023, both partially and simultaneously. Economic growth in West Nusa Tenggara (NTB) has not been evenly distributed across the region, and fiscal capacity along with government expenditure are important factors in driving economic growth. This research employs a quantitative associative approach. Panel data, which combines time series and cross-sectional data, was used with the assistance of Eviews 10 software. The results indicate that fiscal capacity has a negative and insignificant effect on economic growth, while government expenditure has a significant positive effect. Simultaneously, fiscal capacity and government expenditure significantly influence economic growth in West Nusa Tenggara during the 2019–2023 period. These findings emphasize the importance of optimizing fiscal capacity and enhancing the effectiveness of government expenditure in regional development. Therefore, local governments are expected to improve the efficiency of fiscal capacity management and government spending to promote sustainable economic growth in NTB.*

Keywords: *Economic Growth, Fiscal Capacity, Government Expenditure*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kapasitas fiskal dan belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2019 hingga 2023, baik secara parsial maupun simultan. Pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum merata di seluruh daerah, dan kapasitas fiskal bersama dengan pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif kuantitatif. Data panel, yang menggabungkan deret waktu dan data cross-sectional, digunakan dengan bantuan perangkat lunak Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal memiliki efek negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja pemerintah memiliki efek positif yang signifikan. Secara bersamaan, kapasitas fiskal dan belanja pemerintah secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat selama periode 2019–2023. Temuan ini menekankan pentingnya mengoptimalkan kapasitas fiskal dan meningkatkan efektivitas belanja pemerintah dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan kapasitas fiskal dan belanja pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di NTB.

Kata kunci: Belanja Pemerintah, Kapasitas Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi

1. LATAR BELAKANG

Pembangunan dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Pembangunan ekonomi suatu daerah pada hakekatnya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sadar dan terus menerus untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik secara bersama-sama dan berkesinambungan. Dalam konteks tersebut, pembangunan ekonomi juga untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata.

Received: April 19, 2025; Revised: Mei 03, 2025; Accepted: Mei 17, 2025; Published: Mei 21, 2025

Salah satu indikator keberhasilan dalam pembangunan di suatu daerah antara lain dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun pertumbuhan ekonomi sektoral. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada, yang pada akhirnya dapat mencapai kemakmuran suatu bangsa dan daerah (Aminah 2016).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Dengan kata lain pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membiayai pengeluarannya sendiri dengan menggali segala sumber dana yang potensial di daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat hasil pembangunan yang telah dilakukan dan juga berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi daerah adalah produk domestik regional bruto (PDRB), karena di dalamnya mencerminkan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan dan dicapai oleh penduduk selama periode tertentu. (Bappeda NTB) Salah satu kebijakan Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar daerah adalah melalui konsep kawasan strategis provinsi atau kawasan prioritas investasi andalan, yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.

Pada era otonomi ini, diharapkan dapat memotivasi daerah untuk meningkatkan kreatifitas dan inisiatif untuk lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, dan terarah agar pembangunan disetiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah, sehingga daerah dapat menjadi mandiri di dalam pengelolaan kewenangannya yang ditandai dengan semakin tinggi atau kuatnya kapasitas fiskal suatu daerah. Otonomi daerah pada dasarnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah daerah kepada masyarakatnya, hal ini dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih mengetahui kelemahan dan kelebihan di daerahnya sampai pada tingkat yang paling bawah. Untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan dan peran serta masyarakat agar terjadi kepemerataan dan keadilan (Awaliyah Matondang et al., 2024).

Beberapa daerah memiliki rasio kemandirian fiskal tinggi, sedangkan sebagian besar lainnya masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Proporsi dana transfer ke daerah masih didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU), dan terbesar kedua adalah Dana

Alokasi Khusus (DAK), dan kemudian di ikuti oleh Dana Bagi Hasil (DBH). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah untuk menyediakan layanan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen fiskal di daerah (Juma'eh et al., 2020).

Pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen penting dalam kebijakan fiskal yang diharap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan mengoptimalkan pengeluaran (share) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Secara riil pengeluaran pemerintah meningkat sejalan dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dalam hal pembangunan peran pemerintah dapat dikaji melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat daerah (Jubir et al., 2023).

Pengeluaran pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam proyek- proyek yang mengacu pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, peningkatan kesejahteraan, dan program yang menyentuh langsung kawasan yang terbelakang. Pemerintah daerah diharapkan berperan aktif dalam mengelola dan mengembangkan sektor publik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.Pengeluaran pemerintah merupakan seperangkat produk yang dihasilkan yang memuat pilihan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyediakan barang-barang publik dan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Juma'eh et al., 2020) tentang analisis kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejaheraan masyarakat, menunjukkan bahwa kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Selain itu pertumbuhan ekonomi disuatu negara, menjadi alat ukur untuk melihat atau

menganalisa seberapa jauh tingkat perkembangan perekonomian di negara tersebut. Menurut Boediono, "pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Tekanannya pada tiga aspek, yaitu proses, Output perkapita dan jangka panjang. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian. Jadi, "pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat". Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi adalah konsep atau model yang menjelaskan bagaimana dan mengapa perekonomian suatu negara mengalami peningkatan produksi barang dan jasa seiring waktu. Teori ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi, seperti investasi, tenaga kerja, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB), yang menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada periode tertentu.

Kapasitas Fiskal

Menurut keynes (Sukirno 2004), Disimpulkan bahwa, besarnya kapasitas fiskal suatu daerah akan mempengaruhi jumlah biaya pembangunan pada APBD, dengan semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah maka kegiatan dan rencanan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan cepat, sehingga dapat mempercepat pembangunan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif. Tujuan dari fiskal selain untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai pembangunannya sendiri tanpa bantuan pemerintah pusat, yaitu untuk mengetahui seberapa besar porsi DAU oleh pemerintah pusat yang akan diberikan kepada setiap daerah provinsi dalam membantu, membiayai pembangunan daerah (Amanda, 2017).

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional

dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah menstabilkan harga tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan komponen penting bagi pembangunan ekonomi, jika suatu perekonomian peran sektor swasta menurun dalam meningkatkan pembangunan ekonomi, maka pemerintah dapat memacu pembangunan ekonomi dengan cara meningkatkan jumlah pengeluaran pemerintah. Kenaikan pengeluaran pemerintah dapat merangsang perkembangan dari sektor-sektor lain. Belanja adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode tertentu (Jubir et al., 2023)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian berbentuk kuantitatif dengan pendekatan asosiatif (Sugiono, 2013). Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih yang bertujuan mengetahui apakah terdapat hubungan langsung dan tidak langsung pada variabel kapasitas fiskal, dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan peneliti, yaitu melihat pengaruh baik secara parsial maupun simultan antara kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penelitian ini menggunakan data panel dimana data panel adalah gabungan dari data *time series* yaitu data dari tahun 2019-2023 dan *cross section* yaitu data 10 kabuapten/kota di Nusa Tenggara Barat, menggunakan Teknik analisis berupa analisis regresi data panel.

Model umum regresi data panel dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut (baltagi, 2005):

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \cdots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

Dimana Y_{it} menyatakan variabel terikat, X_{it} menyatakan variabel bebas, *i* menyatakan individu ke-*i*, *t* menyatakan variabel bebas ke-*t*, dan e_{it} menyatakan *error cross-section* ke-*i* dan waktu ke-*t*.

Adapun persamaan model regresi data panel dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Keterangan:

Y	=	Pertumbuhan Ekonomi berupa PDRB Atas Dasar Harga Konstan (rupiah)
X1	=	Kapasitas Fiskal (angka)
X2	=	Pengeluaran Pemerintah berupa belanja modal (rupiah)
β0	=	Konstanta
β1- β3	=	Koefisien Regresi
e	=	error
i	=	Cross Section
t	=	Time Series

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Nusa Tenggara Barat adalah sebuah provinsi Indonesia, tepatnya berada dibagian tengah Kepulauan Nusa Tenggara di antara provinsi Bali di sebelah barat dan provinsi Nusa Tenggara Timur di sebelah Timur. Nusa Tenggara Barat memiliki 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota, diantaranya Kota Mataram yang menjadi pusat pemerintah an sekaligus ibu kota provinsi, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Pada pertengahan tahun 2024, pendduk NTB berjumlah 5.666.314 jiwa dengan kepadatan 264 jiwa/km2. Pada tahun 2019 hingga 2020 provinsi Nusa Tenggara Barat sempat mengalami peneurunan pertumbuhan ekonomi kemudian kembali pulih pada tahun 2022 dan 2023. Walaupun mengalami penigkatan tetapi pada beberapa daerah yang tidak terlalu mengalami peningkatan karena kemampuan dan pendapatan daerah yang masih dikatakan rendah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh lansung melalui Badan Pusat Statistika Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD). Data yang di gunakan pada penelitian ini diantaranya yaitu pertumbuhan menggunakan data PDRB dalam harga konstan, kapasitas fiskal menggunakan data kapasitas fiskal untuk melihat kapasitas fiskal, dan pengeluaran pemerintah menggunakan data pengeluaran pemerintah di provinsi NTB tahun 2019-2023.

Menurut Sukirno (2001), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. permasalahan pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umunya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Berikut ini merupakan grafik PDRB Atas Harga Konstan.

Grafik 1. PDRB Atas Harga Konstan (Rupiah) di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023

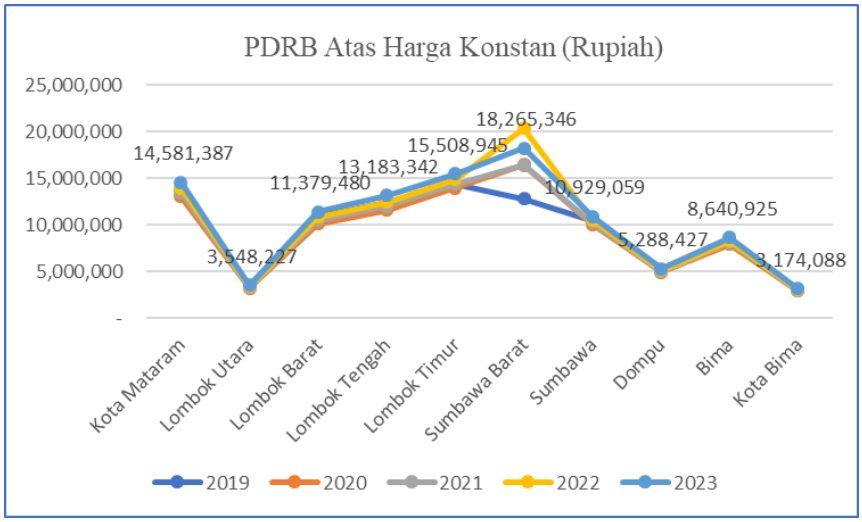

Sumber: data diolah

Grafik menunjukkan tren kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas harga konstan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2019-2023. Kenaikan bersifat konsisten dan signifian selama kurun waktu 2019 hingga 2023 hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di NTB terus tumbuh selama lima tahun terakhir. Di Kota Mataram mengalami kenaikan secara terus menerus kenaikan tersebut menonjol pada tahun 2021 PDRB mataram sebesar Rp.13,475,907, dan terus meningkat sampai pada 2023 sebesar Rp. 14,581,387 . Hal yang sama juga terjadi pada Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima. Daerah yang memiliki nilai PDRB yang terkecil adalah Kota Bima dan disusul Kabupaten Lombok Utara. Semua daerah kabupaten/kota di NTB terus mengalami peningkatan PDRB yang baik, artinya pertumbuhan ekonominya terus meningkat dengan signifikan terutama pada tahun 2021-2023, hal ini terjadi karena kembali adanya aktivitas ekonomi setelah terjadi Covid-19.

Tabel 1. Hasil Estimasi Regresi Random Effect Model

Dependent Variable: LOG_Y
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
Date: 05/10/25 Time: 13:29
Sample: 2019 2023
Periods included: 5
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 25
Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.970535	2.772650	1.432036	0.1662
LOG_X1	-0.053718	0.027766	-1.934640	0.0660
LOG_X2	0.473417	0.092503	5.117875	0.0000

Effects Specification		
	S.D.	Rho
Cross-section random	0.179390	0.9684
Idiosyncratic random	0.032430	0.0316

Weighted Statistics			
R-squared	0.419334	Mean dependent var	1.297138
Adjusted R-squared	0.366546	S.D. dependent var	0.059376
S.E. of regression	0.047257	Sum squared resid	0.049132
F-statistic	7.943764	Durbin-Watson stat	0.952356
Prob(F-statistic)	0.002530		

Sumber: Eviews 10

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menggunakan *Eviews 10* dan dengan alat analisis pemodelan regresi data panel, maka mendapatkan hasil sebagai berikut:

Pengaruh kapasitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabuapten/kota provinsi NTB tahun 2019-2023

Dari hasil penelitian yang telah diuji secara parsial untuk variabel kapasitas fiskal dapat disimpulkan bahwa kapasitas fiskal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa antara kapasitas fiskal dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023 memiliki pengaruh yang tidak signifikan.

Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi NTB tahun 2019-2023

Dari hasil penelitian yang telah diuji menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya semakin tinggi pengeluaran pemerintah dalam hal pembangunan daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ha ini mendeskripsikan bahwa antara pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi NTB tahun 2019-2023 memiliki pengaruh signikan.

Pengaruh kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di provinsi NTB tahun 2019-2023

Dari hasil penelitian yang telah di uji bahwa variabel kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat ditujukkan berdasarkan nilai signifikasi sebesar 0.002530 lebih kecil dari 0,05 (0.002530 < 0,05). Sementara diketahui bahwa nilai Adjusted R- squared sebesar 0.366546 atau 36.65%, nilai ini menjelaskan bahwa variabel kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah mampu menjelaskan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi NTB pada tahun 2019-2023 sebesar 36.65% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain contohnya investasi dan variabel penggerak pertumbuhan ekonomi lainya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kapasitas fiskal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi rovinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kapasitas fiskal meningkat, belum tentu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini bisa terjadi karena masih tingginya ketergantungan daerah pada dana transfer pusat yang belum mampu dikelola dengan baik secara produktif sedangkan pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhada pertumbuhan ekonomi. Secara bersama-sama (simultan) kapasitas fiskal dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023.

Saran

Pemerintah diharapkan mampu mengelola kapasitas fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan pengeluaran pemerintah dengan mengarahkan atau menyalurkan pengeluaran pemerintah pada sektor-sektor yang produktif dan memberikan efek jangka Panjang terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di NTB.

Bagi peneliti selanjutnya, dikarenakan penelitian ini menggunakan variabel yang terbatas disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berkaitan. Selain itu mengubah studi kasus didaerah tertentu atau memperpanjang rentang waktu penelitian, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas bagi peneliti.

DAFTAR REFERENSI

Amanda, I. F., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (2017). *Pengaruh Kapasitas Fiskal (Fiscal Capacity) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota Provinsi Lampung Tahun 2011-2015*. *2015*.

Awaliyah Matondang, K., Meutia Fahrani, Deyren Firmansyah, & Ulina Br Naibaho, N. N. (2024). Pendapatan dan Pengaruh Belanja Modal terhadap Investasi Swasta Diindonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(6), 3877–3888. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1263

Bahl, R., & Linn, J. (1992). *Urban public finance in developing countries*. Oxford University Press.

Barro, R. J. (1990). Government spending in a simple model of endogenous growth. *Journal of Political Economy*, *98*(5), S103–S125. https://doi.org/10.1086/261726

Hamdani, I., Sri Nesta, N., Rahmawati, J., & Hidayat, F. (2023). Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, *1*(3), 187–203. https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i3.902

Jubir, J., Ikbal, M., Hamid, R. S., & Goso, G. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu. *Jesya*, *6*(1), 71–91. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.900

Juma'eh, Harin Tiawon, & Alexandra Hukom. (2020). Analisis Kapasitas Fiskal dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. *Journal of Environment and Management*, *1*(1), 40–45. https://doi.org/10.37304/jem.v1i1.1204

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice* (5th ed.). McGraw-Hill.

Prasetyo, A., & Susilowati, I. H. (2020). Analisis pengaruh belanja modal dan investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 18*(1), 25–34.

Sakti, I. M., & Harun, C. A. (2021). Analisis belanja pemerintah daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, *5*(1), 1–17. https://doi.org/10.36574/jpp.v5i1.128

Siregar, H., & Wahyuni, T. (2014). The effect of government spending on economic growth: The case of Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 19*(2), 134–142. https://doi.org/10.23917/jep.v19i2.118

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.